

Sejarah Bank Indonesia

Periode VII: 2004 - 2011

Indonesia Menghadapi Globalisasi Keuangan



**GROUP RISET KEBANKSENTRALAN
PUSAT RISET DAN EDUKASI BANK SENTRAL
BANK INDONESIA**

DAFTAR ISI

Sambutan Gubernur Bank Indonesia	iii
Sambutan Deputy Gubernur Bank Indonesia	v
Pengantar Kepala Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral	vii
Daftar Isi	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PERKEMBANGAN KONDISI GLOBAL DAN DOMESTIK	15
1. Sekilas Perkembangan Perekonomian Dunia	16
a. Menguatnya Perekonomian Global dan Episode Kenaikan Harga Minyak Dunia (2004-2006)	17
b. Krisis <i>Subprime Mortgage</i> dan Krisis ekonomi Global (2007-2009)	22
c. Pemulihan Ekonomi Global (2010-2011)	32
2. Sekilas Perkembangan Perekonomian Indonesia	36
a. Pertumbuhan Ekonomi	36
b. Laju Inflasi	43
c. Perkembangan Nilai Tukar 2004-2011	49
d. Perkembangan Neraca Pembayaran 2004-2011	56
e. Perkembangan Utang Luar Negeri 2004-2011	64
f. Perkembangan Keuangan Pemerintah	68
g. Perkembangan Likuiditas Perekonomian 2004-2011	79
3. Perkembangan Sosial Politik di Indonesia	86

BAB 3	PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA	93
1.	Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	95
a.	Makna Independensi Bank Indonesia	96
b.	Tujuan Bank Indonesia	97
c.	Ketentuan Modal Bank Indonesia	99
d.	Pengalihan Kewenangan Penetapan Target Inflasi dari Bank Indonesia Kepada Pemerintah (Menteri Keuangan)	101
e.	Badan Supervisi Bank Indonesia	103
f.	Pengangkatan dan Pemilihan Dewan Gubernur	107
g.	Kemandirian Anggaran Bank Indonesia	113
h.	Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi	116
i.	Pengalihan Pengawasan Perbankan	120
j.	Program Divestasi Bank Indonesia	123
2.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang	124
3.	Fungsi Bank Indonesia sebagai <i>The Lender of the Last Resort</i> (LoLR)	128
a.	LoLR Dalam Undang-undang Bank Indonesia	128
b.	LoLR Dalam Perpu No. 2 Tahun 2008	139
c.	LoLR Dalam Perpu No. 4 Tahun 2008 (Perpu JPSK)	142
d.	LoLR Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan	148

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang	
e. LoLR Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan	149
4. Pemantapan Peran Perbankan Syariah	155
a. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	156
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	158
c. Kelembagaan Bank Indonesia terkait Undang-Undang Perbankan Syariah	159
5. Penetapan Bank Indonesia Sebagai Wajib Pajak	162
6. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	165
a. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan	167
b. Tujuan, Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan	168
7. Penguatan Peran Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Kegiatan Transfer Dana	169
8. Koordinasi pengadaan dan pengelolaan Mata Uang dengan Pemerintah	172
9. Museum Bank Indonesia	175
a. Visi dan Misi Museum Bank Indonesia	177
b. Program Utama dan Kegiatan Museum Bank Indonesia	178
c. Sejarah Bangunan Museum Bank Indonesia	179
10. Perkembangan Organisasi Bank Indonesia	180
a. Organisasi Bank Indonesia Kantor Pusat	181
b. Organisasi di Kantor Bank Indonesia (KBI)	185
c. Organisasi di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia di Luar Negeri	191

BAB 4	KEBIJAKAN MONETER	193
1.	Kebijakan Moneter	194
a.	Penyempurnaan Kerangka Kebijakan Moneter dengan Kerangka Kerja Sasaran Inflasi (<i>Inflation Targetting Framework-ITF</i>)	196
b.	Penyempurnaan Kerangka Operasional Kebijakan Moneter	203
c.	Kebijakan Suku Bunga	223
d.	Kebijakan Nilai Tukar dan Lalu Lintas Devisa	229
e.	Kebijakan Makroprudensial	248
f.	Komunikasi Kebijakan Moneter	256
2.	Penguatan Koordinasi Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Kebijakan Moneter	258
a.	Koordinasi Kebijakan Moneter, Fiskal dan Pengelolaan Uang Negara	258
b.	Koordinasi Kebijakan Terkait Nilai Tukar dan Cadangan Devisa	262
c.	Tim Pengendali Inflasi (Daerah)–TPI (D)	264
3.	Kerjasama dengan Lembaga Terkait Bank Sentral	267
a.	MOU dan Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik	268
b.	Kerjasama Internasional	269
BAB 5	KEBIJAKAN PERBANKAN	303
1.	Kebijakan Umum Sektor Perbankan	305
a.	Arah Kebijakan dan Pengembangan Infrastruktur Perbankan	305
b.	Konsolidasi Perbankan	320
c.	Kebijakan Perbankan Lainnya	324
2.	Perkembangan Kinerja dan Kebijakan Bank	327
a.	Perkembangan Kinerja Bank Umum Konvensional	327

b.	Perkembangan Kebijakan Bank Umum Konvensional	332
c.	Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah	362
d.	Perkembangan Kebijakan Bank Umum Syariah	367
e.	Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)	389
f.	Perkembangan Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	392
g.	Perkembangan Kebijakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional	395
h.	Perkembangan Kebijakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	395
BAB 6	PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH	411
1.	Sistem Pembayaran	411
a.	Sistem Pembayaran Bernilai Besar (<i>High Value Payment System</i>) yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia	414
b.	Sistem Pembayaran Ritel	429
c.	Masyarakat Ekonomi ASEAN	447
2.	Pengelolaan Uang Rupiah	451
a.	Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah	452
b.	Penyediaan Uang Berkualitas dan Terpercaya	464
c.	Pengelolaan Uang Rupiah yang Aman, Handal dan Efisien	484
d.	Layanan Kas Prima	488
e.	Penguatan Infrastruktur Peralatan Perkasan dan Sistem Informasi Pengedaran Uang	497
f.	Pengelolaan Museum Artha Suaka	502

Daftar Pustaka	625	Lampiran XIV	Sistem Informasi Debitur	535
Daftar Singkatan dan Akronim	641	Lampiran XV	Peningkatan Perlindungan Nasabah	537
Glosarium	651	Lampiran XVI	Konsolidasi Perbankan	542
Sambutan Gubernur Bank Indonesia	iii	Lampiran XVII	Program Penjaminan	546
Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia	v	Lampiran XVIII	Laporan Bank-Bank	549
Pengantar Kepala Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral	vii	Lampiran XIX	Dewan Komisaris	556
Daftar Isi	xi	Lampiran XX	Penetapan status Bank	558
		Lampiran XXI	Prinsip Kehati-hatian	560
LAMPIRAN		Lampiran XXII	Perkembangan Kebijakan BUS	563
Lampiran I	Kebijakan Moneter Kerangka ITF	Lampiran XXIII	Perkembangan Kinerja BPR	568
Lampiran II	Keterkaitan antar variabel dan pencapaian target inflasi	Lampiran XXIV	Perkembangan Kinerja BPRS	570
Lampiran III	Operasi Moneter	Lampiran XXV	Perkembangan Kebijakan BPR	573
Lampiran IV	Matriks Penyebaran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Lampiran XXVI	Perkembangan Kebijakan BPRS	575
Lampiran V	Daftar Susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia 2004-2011	Lampiran XXVII	Kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi BPR/BPRS	577
Lampiran VI	Daftar Susunan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia	Lampiran XXVIII	Pembukaan dan Penutupan Kantor Cabang BPR/BPRS	580
Lampiran VII	Kebijakan Umum Sektor Perbankan	Lampiran XXIX	Prosedur Bank Dalam Pengawasan Intensif dan Dalam Pengawasan Khusus	583
Lampiran VIII	Perkembangan Modal Minimum	Lampiran XXX	Tahapan Penyehatan dan <i>Exit Policy</i> bagi Bank yang Tidak Ikut Dalam Program Penjaminan Pemerintah	585
Lampiran IX	25 <i>Basel Core Principles for effective Banking Supervision</i>	Lampiran XXXI	Rencana Perbaikan Permodalan	586
Lampiran X	Rincian Pilar Basel II	Lampiran XXXII	Prosedur Bank Dalam Pengawasan Intensif dan Dalam Pengawasan Khusus	589
Lampiran XI	Kebijakan <i>Good Corporate Governancce</i> (GCG)	Lampiran XXXIII	Bank Dalam Pengawasan Khusus (<i>Special Surveillance</i>)	589
Lampiran XII	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Perbankan Syariah	Lampiran XXXIV	Daftar dan Nomor Kebijakan Perbankan Periode 2004-2011	594
Lampiran XIII	Mempersyaratkan Sertifikasi Manajemen Risiko	Lampiran XXXV	Tabel-Tabel Kebijakan Perbankan	606